

TATA KELOLA PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK

Angger Eka Septiani¹, Kartika Hendra Titisari², Yuli Chomsatu³

Universitas Islam Batik, Jl. KH. Agus Salim No.10 Surakarta, Indonesia

Email : ¹anggerseptiana22@gmail.com , ²kartikatitisari@yahoo.com , ³chom_satoe@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan *firm size* terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah 43 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 21 perusahaan dengan total 63 sampel periode tahun 2015-2017. Metode analisis data yang penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari kelima variabel independen hanya *firm size* yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *corporate governance* yang diproksikan oleh kepemilikan institusional, komite audit, *leverage* dan dewan komisaris independen tidak terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Tax Avoidance

Abstract

This study aims to examine the effect of *corporate governance* and *firm size* on *tax avoidance*. The population of 1 this study is 43 consumer goods industry companies listed on the IDX for the period 2015-2017. The sampling technique used was *purposive sampling technique* and obtained 21 companies with a total of 63 samples for the period 2015-2017. The method of data analysis in this study used multiple linier regression analysis. The results in this study show that of the five independent variables only *firm size* has an effect on *tax avoidance*. While *corporate governance* variables that are proxied by institutional ownership, audit committee, *leverage* and independent board of commissioners have no effect *tax avoidance*.

Keywords : Corporate Governance, Firm Size, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan yang terbesar bagi negara dan menempati presentase tertinggi dalam APBN dibandingkan penerimaan lainnya. Pemerintah mengharapkan agar wajib pajak atau masyarakat ikut berpartisipasi dalam perpajakan demi kesejahteraan bersama dan dari pembayaran tersebut pemerintah bisa melaksanakan perencanaan pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun, sebagian orang menganggap bahwa pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan.

Tidak semua perusahaan menyambut baik pelaksanaan pemungutan pajak yang diselenggarakan pemerintah. Perusahaan berupaya meminimalkan pembayaran pajak karena pajak yang dibayarkan akan mengurangi pendapatan, sedangkan pemerintah mengharapkan pembayaran pajak semaksimal mungkin yang berguna untuk

membiayai program-program pemerintah. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah ini mengakibatkan wajib pajak menekan pembayaran pajak, baik legal maupun ilegal. Perusahaan merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam pajak. Agar memperoleh laba yang maksimal, perusahaan berupaya dengan meminimalkan beban pajak. Kegiatan meminimalkan pembayaran pajak dengan cara yang legal disebut penghindaran pajak, sedangkan dengan cara ilegal disebut (*tax evasion*) (Darmawan & Sukartha, 2014).

Salah satu hal yang bisa mempengaruhi *tax avoidance* adalah *corporate governance* dan *firm size*. Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan oleh kepemilikan institusional, komite audit, *leverage* dan dewan komisaris independen.

Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2014) dalam (Wijayanti & Merkusiwati, 2017)

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah, institusi keuangan, , institusi luar negeri, institusi berbadan hukum dan dana perwalian dan institusi lainnya. Kepemilikan saham bisa menggantikan sumber kekuasaan yang digunakan untuk mendukung maupun sebaliknya terhadap manajemen.

Dalam struktur *corporate governance*, komite audit sudah menjadi komponen umum. Komite audit memiliki fungsi sebagai pengawasan internal dan pengawas proses pembuatan laporan keuangan, karena peraturan dari BEI mengharuskan semua perusahaan membentuk dan wajib memiliki komite audit yang diketuai oleh dewan komisaris independen sesuai surat edaran dari BEI sedikitnya perusahaan memiliki tiga orang komite audit (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016).

Leverage adalah penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk investasi perusahaan dan memenuhi kebutuhan operasional. Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul akan menjadi pemotong laba bersih perusahaan yang kemudian mengurangi pembayaran pajak dan memaksimalkan keuntungan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak yang diharapkan bisa meminimalisir kecurangan yang bisa terjadi.

Selain *corporate governance* salah satu aspek lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *firm size*. Total aset dalam perusahaan bisa digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan sehingga semakin besar total aset dalam perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal ini juga yang berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak.

Penelitian ini adalah penelitian replikasi yang menggabungkan beberapa penelitian sebelumnya (Darmawan & Sukartha, 2014) (Waluyo, 2017) dan (Okarayanti, Utomo, & Nuraina, 2017) tentang *Tax Avoidance* dengan hasil penelitian yang beragam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan variabel *Leverage* sebagai

proksi dari *Corporate Governance*. Objek penelitian ini juga berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI, karena perusahaan tersebut adalah perusahaan penghasil barang dan penyedia kebutuhan primer sehingga sektor tersebut mampu bertahan meskipun keadaan ekonomi sedang tidak stabil. Dan perusahaan industri barang konsumsi cenderung berkembang terus menerus di dalam penjualannya sehingga mengakibatkan pajak yang harus dibayar semakin besar yang mengakibatkan perusahaan menjalankan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah penelitian ini yaitu Apakah *Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional, Komite Audit, *Leverage* dan Dewan Komisaris Independen) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*? dan Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

LANDASAN TEORITIS

1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) digunakan sebagai dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori keagenan adalah teori yang menunjukkan adanya ikatan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Teori keagenan adalah teori dasar yang biasanya digunakan dalam praktik bisnis suatu perusahaan. Prinsip utama dalam teori ini yaitu terdapat hubungan kerja antara pemberi wewenang yaitu investor dan penerima wewenang yaitu manajer.

Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan berskala besar akan memiliki sumber daya yang berlimpah yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Menurut teori agensi, sumber daya perusahaan bisa digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan menekan pembayaran pajak untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Darmawan & Sukartha, 2014).

2. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah salah satu cara menghindari pembayaran pajak dengan cara legal dan tidak menyalahi peraturan. Menurut Lyons “*Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer’s affairs so as to reduce his tax liability*”. Penghindaran pajak adalah rekayasa ‘*tax affairs*’ yang berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful) (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Dengan memanfaatkan celah dari perundang-undangan yang berlaku perusahaan melaksanakan strategi atau cara-cara yang legal. Strategi tersebut bisa diterapkan dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Berdasarkan pengertian tersebut bisa disimpulkan penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak dalam meminimalisasi beban pajak secara legal dan memanfaatkan celah dari undang undang perpajakan. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment system* (Safitri, 2017).

3. **Corporate Governance**

Corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang menyatakan hubungan antara partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008) dalam (Maharani & Suardana, 2014). Dalam penelitian ini *Corporate Governance* diproksikan oleh kepemilikan institusional, komite audit, *leverage*, dan dewan komisaris independen.

a. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dan lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Dalam terminologi di bursa saham, arti kepemilikan institusional dalam bahasa inggris sering disitilahkan dengan *Institutional Ownership* atau *Institutional Sponsorship*. Lembaga-lembaga ini bisa berupa : Perusahaan Reksa Dana, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Investasi, dan Yayasan Swasta, wakaf atau badan besar lainnya yang mengelola dana atas nama orang lain.

b. **Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris serta bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam peraturan BEI, perusahaan harus mempunyai paling sedikit 3 orang komite audit.

c. **Leverage**

Leverage adalah tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan suatu pembiayaan dan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Jumlah utang yang timbul akan menimbulkan beban pada perusahaan. Beban yang timbul tersebut akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dan juga akan mengurangi pembayaran pajak. *Leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu perusahaan menggunakan utang untuk pembiayaan usahanya tersebut. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaannya maka akan beban bunga yang harus dibayar pihak perusahaan dan bunga tersebut akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Okroyanti, Utomo, & Nuraina, 2017).

d. **Dewan Komisaris Independen**

Berdasarkan teori keagenan semakin banyak jumlah komisaris independen di dalam perusahaan maka komisaris independen semakin baik dalam memenuhi peran mereka untuk melaksanakan monitoring dan *controlling* pada tindakan pihak manajemen sehubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin terjadi (Jensen & Meckling, 1976). Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah

mengkoordinasi-kan kegiatan Dewan Komisaris (KNKG, 2006).

4. Firm Size

Menurut Hormati (2009) dalam (Okroyanti, Utomo, & Nuraina, 2017) definisi ukuran perusahaan sebagai skala yang bisa mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size* dan sebagainya. Perusahaan besar dianggap sudah dewasa (*mature*) dan relatif lebih mudah untuk mendapatkan akses kedalam pasar modal.

Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui *log total aset*, karena dinilai ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Yogianto, 2007).

5. Perumusan Hipotesis

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H2 : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H4 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H5 : *Firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2017. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Berdasarkan kriteria sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 21 perusahaan dengan total data 63 laporan keuangan tahunan perusahaan industri barang konsumsi periode tahun 2015-2017.

Tabel 1. Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Perusahaan
1.	Jumlah Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi	43
2.	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> periode tahun 2015-2017	12
3.	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang mengalami kerugian dalam periode tahun 2015-2017	7
4.	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak memiliki data lengkap	3
5.	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang selain menggunakan mata uang rupiah	0
Total Sampel		21
Total data observasi periode tahun 2015-2017		63

1. Definisi Operasional variabel

a. Tax Avoidance (Y)

Tax avoidance diukur dengan CETR yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

b. Kepemilikan Institusional (X1)

Kepemilikan institusional diukur dengan KI yaitu kepemilikan saham institusional dibagi dengan total saham yang beredar.

c. Komite Audit (X2)

Komite Audit diukur dengan KA yaitu jumlah komite audit di perusahaan tersebut.

d. Leverage (X3)

Leverage diukur dengan DAR yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset.

e. Dewan Komisaris Independen (X4)

Komisaris independen diukur dengan DKI yaitu jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris.

f. Firm Size (X5)

Firm Size diukur dengan SIZE yaitu dibagi dengan Logaritma natural Total Aset.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Analisis statistik deskriptif berguna untuk memberikan suatu gambaran yang bisa dilihat dari nilai *mean*, nilai minimum dan nilai maksimum. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji

autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh *corporate governance* yang diproksikan oleh kepemilikan institusional (KI), komite audit (KA), *leverage* (DAR) dan dewan komisaris independen (DKI) dan variabel *firm size* (SIZE) terhadap *tax avoidance* (CETR). Adapun persamaan regresinya dirumuskan sebagai berikut :

$$CETR = a + \beta_1 KI + \beta_2 KA + \beta_3 DAR + \beta_4 DKI + \beta_5 SIZE + e$$

Keterangan :

CETR	= <i>Tax Avoidance</i>
KI	= Kepemilikan Institusional
KA	= Komite Audit
DAR	= <i>Leverage</i>
DKI	= Dewan Komisaris Independen
SIZE	= <i>Firm Size</i>
a	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
e	= Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR (Y)	63	0,066	0,349	0,25337	0,045229
KI (X1)	63	0,051	0,930	0,71173	0,196861
KA (X2)	63	3,000	4,000	3,04762	0,214669
DAR (X3)	63	0,146	0,726	0,36837	0,166148
DKI (X4)	63	0,333	0,800	0,42646	0,110714
Size (X5)	63	26,671	32,151	29,12310	1,557755

Variabel *Tax Avoidance* (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,066 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,349 dengan rata-rata sebesar 0,25337 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,045229. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya $0,25117 > 0,045229$ artinya sebaran nilai *tax avoidance* baik.

Variabel Kepemilikan Institusional (X1) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,051 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,930 dengan rata-rata sebesar 0,71173 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,196861. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya $0,71173 > 0,196861$ artinya sebaran nilai kepemilikan institusional baik.

Variabel Komite Audit (X3) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,000 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4,000 dengan rata-rata sebesar 3,04762 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,214669. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya $3,04762 > 0,214669$ artinya sebaran nilai komite audit baik.

Untuk variabel *Leverage* (X3) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,146 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,726 dengan rata-rata 0,36837 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,166148. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya $0,36837 > 0,166148$ artinya sebaran nilai *leverage* baik.

Variabel Dewan Komisaris Independen (X4) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,333 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,800 dengan rata-rata sebesar 0,42646 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,110714. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya $0,42646 > 0,110714$ artinya sebaran nilai dewan komisaris independen baik.

Yang terakhir variabel *Firm Size* (X5) menunjukkan nilai minimum sebesar 26,671 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 32,151 dengan rata-rata sebesar 29,12310 dan nilai standar deviasinya sebesar 1,557755. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya $29,12310 > 1,557755$ artinya sebaran nilai *firm size* baik.

2. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Sig	Probabilitas	Kesimpulan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,056	> 0,05	Data berdistribusi normal.

Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas diatas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang dilaksanakan dengan nilai residual dan diperoleh nilai signifikansi lebih besar

dari 0,05 ($0,056 > 0,05$) yang menunjukkan bahwa model regresi terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Standar	VIF	Standar	Keterangan
KI (X1)	0,870	> 0,10	1,150	< 10	Bebas Multikolinearitas
KA (X2)	0,975	> 0,10	1,025	< 10	Bebas Multikolinearitas
DAR (X3)	0,863	> 0,10	1,159	< 10	Bebas Multikolinearitas
DKI (X4)	0,776	> 0,10	1,288	< 10	Bebas Multikolinearitas
SIZE (X5)	0,870	> 0,10	1,149	< 10	Bebas Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolinearitas diatas, menunjukkan bahwa variabel independen (kepemilikan institusional, komite audit, *leverage*, dewan komisaris independen dan *firm*

size) yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance > 0,01 dan nilai VIF < 10 sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas

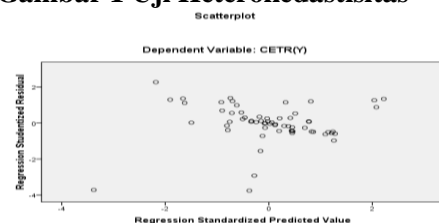
Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	dL	dU	4-DL	4-dU	Kesimpulan
1,870	1,427	1,767	2,573	2,233	Tidak ada autokorelasi

Berdasarkan tabel 5 hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan nilai DW sebesar 1,870. Untuk nilai dU dan dL bisa dilihat dari DW tabel dengan signifikansi 0,05 dengan nilai N (jumlah data) sebanyak 63 observasi dan jumlah variabel independen sebanyak 5 variabel, maka diperoleh nilai dL sebesar 1,427 sedangkan nilai dU sebesar 1,767. Jadi nilai dari 4-dU sebesar 2,233 dan 4-dL sebesar 2,573. Maka nilai dari DW terletak antara dU dan 4-dU ($1,767 < 1,870 < 2,233$) sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1 Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar 1 grafik *scatterplot* hasil uji heterokedastisitas diatas menunjukkan bahwa titik menyebar dan tidak berbetuk pola khusus. Maka, bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients B</i>	t-hitung	Sig	Hasil Uji t
Konstanta	0,144	1,098	0,277	
KI(X1)	-0,013	-0,429	0,669	H1 Ditolak
KA(X2)	-0,048	-1,870	0,067	H2 Ditolak
DAR(X3)	0,037	1,059	0,294	H3 Ditolak
DKI(X4)	-0,051	-0,907	0,368	H4 Ditolak
SIZE(X5)	0,009	2,497	0,015	H5 Diterima
<i>R Square</i> = 0,175		<i>F</i> -hitung = 2,410		
<i>Adjusted R Square</i> = 0,102		<i>Sig.</i> = 0,047		

Uji Analisis Regresi

Adapun persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,144 - 0,013KI - 0,048KA + 0,037DAR - 0,051DKI + 0,009SIZE$$

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Untuk mengidentifikasi layak atau tidaknya suatu model regresi yaitu dengan melihat nilai signifikannya (Sig) pada taraf kepercayaan 0,05 atau 5%. Jika F hitung > F tabel dan signifikansi < 0,05, maka model yang diestimasi dalam penelitian ini telah memenuhi uji ke Berdasarkan tabel 6 hasil uji F diatas menunjukkan bahwa F hitung sebesar 2,410 dengan signifikansi 0,047. F tabel bisa dilihat dari tabel F pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df1 = jumlah variabel – 1 = 6 – 1 = 5 dan df2 = 63 – 5 – 1 = 57 adalah 2,38. Hasil pengujian menunjukkan bahwa F hitung > F tabel (2,410 > 2,38) dan signifikansi < 0,05 (0,047 < 0,05) bisa disimpulkan bahwa Model Layak.

Uji Hipotesis (Uji t) dan Pembahasan

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 0,05 / 2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan (df) = 63 – 5 – 1 = 57 diperoleh untuk t tabel sebesar 2,002.

Berdasarkan tabel 6 hasil uji t variabel kepemilikan institusional (X1) diperoleh t hitung sebesar -0,429. Ternyata -t hitung lebih besar dari -t tabel (-0,429 > -2,002) dan nilai signifikansi sebesar 0,669 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,669 > 0,05). Maka bisa disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak atau dengan kata lain variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin rendah proporsi kepemilikan institusional disuatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Maharani & Suardana, 2014) namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Putri & Putra, 2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengujian variabel komite audit (X2) diperoleh t hitung sebesar -1,870. Ternyata -t hitung lebih besar dari -t tabel (-1,870 > -2,002) dan nilai signifikansi sebesar 0,067 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,067 > 0,05). Maka bisa disimpulkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak atau dengan kata lain variabel

komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sedikit atau banyaknya jumlah komite audit yang terdapat dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016) namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Titisari & Mahanani, 2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Untuk hasil uji t variabel *leverage* (X3) diperoleh t hitung sebesar 1,059. Ternyata t hitung lebih kecil dari t tabel (1,059 < 2,002) dan nilai signifikansi sebesar 0,294 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,294 > 0,05). Maka bisa disimpulkan bahwa H0 diterima dan H3 ditolak atau dengan kata lain variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya *leverage* pada perusahaan tidak berpengaruh kepada penghindaran pajak, dikarenakan keputusan pendanaan yang diambil oleh pihak perusahaan yang bersumber dari pinjaman modal kepada pihak pemegang saham atau pihak realisasi sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak bisa digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016) namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Swingly & Sukartha, 2015) yang menyimpulkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan pengujian variabel dewan komisaris independen (X4) diperoleh t hitung sebesar -0,907. Ternyata -t hitung lebih besar dari -t tabel (-0,907 > -2,002) dan nilai signifikansi sebesar 0,368 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,368 > 0,05). Maka H0 diterima dan H4 ditolak yang artinya variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa komisaris independen yang besar, tidak efektif dalam pencegahan praktik penghindaran pajak. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian (Asri & Suardana, 2016) namun, hasil tersebut tidak sejalan

penelitian (Maharani & Suardana, 2014) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dan yang terakhir pengujian variabel *firm size* (X5) diperoleh t hitung sebesar 2,497. Ternyata t hitung lebih besar dari t tabel ($2,497 > 2,000$) dan nilai signifikansi sebesar 0,015 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ($0,015 < 0,05$). Maka bisa disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima atau dengan kata lain variabel *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar tingkat *tax avoidance*. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian (Darmawan & Sukartha, 2014), (Asri & Suardana, 2016) dan (Okrayanti, Utomo, & Nuraina, 2017) yang menyatakan bahwa *Firm Size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Berdasarkan tabel 6 hasil uji koefisien diatas menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel KI, KA, DAR, DKI dan SIZE terhadap *tax avoidance* sebesar 10,2 % . bisa dilihat dari nilai *Adjusted R*

Square sebesar 0,102. Sedangkan 89,8 % *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. *Firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan perusahaan yang dijadikan populasi tidak hanya di sektor industri barang konsumsi dan juga menambahkan tahun periode penelitian.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel yang akan digunakan seperti profitabilitas, umur perusahaan dan lainnya agar hasil penelitian *tax avoidance* lebih bervariasi.
3. Bagi investor dan perusahaan diharapkan untuk membayar pajak sesuai yang dibebankan terhadap perusahaan.

Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal of Accounting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, I. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Prefensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 72-100.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang
- Darmawan, I. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 143-161.
- Dewinta, I. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1584-1613.

- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. 83(1).
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Padang*.
- Hormati. (2009). Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 288-298.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- KNKG. (2006). *Pedoman GCG Indonesia 2006*. Retrieved November 19, 2018, from KNKG Web Site: www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf
- Maharani, I. G., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 525-539.
- Ngadiman, & Puspitasari. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 408-421.
- Okrayanti, T. Y., Utomo, S. W., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI). *FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI*, 804-817.
- Putra, I. C., & Merkusiwati, N. A. (2016). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, SIZE DAN CAPITAL INTENSITY RATIO PADA TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 690-714.
- Putra, I. N., & Merkusiwati, N. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 690-714.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 1-11.
- Safitri, V. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Ritel yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 47-62.
- Titisari, K. H., & Mahanani, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Juara*.
- Waluyo. (2017). The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance: Empirical Study Of The Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of BINANIAGA*.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. L. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 699-728.
- Yogianto. (2007). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE.

